



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026, sesuai ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Tahun Anggaran 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2026.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Renja Perangkat Daerah meliputi:

- a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- b. bab II berisi hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024.
- c. bab III berisi tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menjelaskan telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, tujuan, dan sasaran serta program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- d. bab IV berisi rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan.
- e. bab V berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI TUBAN,



ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban

pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
TUBAN TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan lima tahunan, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang merupakan perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah disusun sebagai perencanaan lima tahunan dalam rangka mencapai Visi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan amanah dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 11 Ayat (3) serta Pasal 13 Ayat (2) yang didalamnya memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Tahun bersangkutan, dengan melalui tahapan-tahapan berikut :

- (1) Persiapan, dengan bahan-bahan yang diperlukan serta pembentukan Tim Penyusun;
- (2) Penyusunan rancangan awal, yang mencakup analisa gambaran pelayanan Perangkat daerah dan hasil evaluasi renja tahun lalu;
- (3) Penyempurnaan Rancangan Awal Renja;

- (4) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah yang merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
- (5) Penyampaian Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD;
- (6) Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana rekomendasi hasil verifikasi Bappeda;
- (7) Penyampaian kembali Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan kepada Bappeda;
- (8) Penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
- (9) Penyampaian kembali rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk diverifikasi;
- (10) Penyempurnaan dan penyampaian kembali Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda;
- (11) Penetapan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah;

Dengan dilaluinya beberapa tahapan tersebut diharapkan dapat menjamin adanya kepastian keterkaitan dan keselarasan antar beberapa dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya, mulai dari RPJMD, RKPD serta Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2026 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
21. Peraturan Gubernur Jawa timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020 – 2040;
24. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 43 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban;
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari rencana pelaksanaan pembangunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan linieritas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan perangkat daerah dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman dan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang diimplementasikan pelaksanaannya kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 sebagai rincian penjabaran atas pelaksanaannya, yang berisikan pagu indikatif pendanaan yang tertuang didalam rekening belanja dengan indikator dan target kinerjanya yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 129, Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban terbentuk sebagai akibat dari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam rangka mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah melalui penggunaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pada tahapan : perencanaan pembangunan daerah, perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah, serta analisis informasi pemerintahan daerah lainnya yang disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang mana berdasarkan hasil pengelompokan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan pemerintahan yang ditangani tersebut terbentuklah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang merupakan penggabungan dua urusan serumpun yakni urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar bidang koperasi dan usaha kecil menengah dengan urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan.

Sesuai dengan uraian diatas maka untuk melihat hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada Tahun 2024 serta pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat dilihat berdasarkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang mana didalam Rencana Kerja Tahun 2024 telah dialokasikan sejumlah anggaran untuk menangani kedua urusan tersebut beserta urusan penunjang kesekretariatan sebesar Rp25.624.676.486,00 sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 telah terserap kedalam belanja pembangunan sebesar Rp19.703.022.274,00 atau sebesar 76,89%, sehingga masih menyisakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) sebesar 23,11% dari total anggaran atau sebesar Rp5.921.654.212,00 sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel II.01
Realisasi Anggaran Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan
Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2024

No.	Urusan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Urusan Pemerintahan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.598.071.776	14.791.889.005	79,53
	a. Bidang Koperasi	569.497.600	563.964.022	99,03
	b. Bidang Usaha Kecil dan Menengah	1.520.897.690	1.326.671.307	87,22
	c. Kegiatan Rutin	16.507.676.486	12.901.253.676	78,15
2.	Urusan Pemerintahan Pilihan Perdagangan	7.026.443.730	4.911.133.269	69,90
	Jumlah	25.624.676.486	19.703.022.274	76,89

Sumber : LKjIP Diskopumdag Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari kedua urusan yang ditangani tersebut urusan koperasi mampu menyerap anggaran sebesar 99,03% lebih tinggi dari penyerapan anggaran pada urusan usaha kecil dan menengah yang hanya sebesar 87,22%, serta urusan pilihan perdagangan sebesar 69,90%, sementara untuk kegiatan rutin hanya mampu menyerap anggaran sebesar 78,15%.

Dari penyerapan anggaran pada kedua urusan yang ditangani tersebut tentunya terkait erat dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebagaimana perjanjian kinerja yang telah disepakati pada awal tahun anggaran yang mana pencapaiannya pada akhir tahun anggaran dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.02
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah serta Urusan Perdagangan Tahun 2024

No.	Urusan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
1.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan usaha mikro yang menjadi wirausaha	Tingkat Kenaikan koperasi yang meningkat kualitasnya	6,50	7,14	109,89
			Tingkat kenaikan Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	25	36,11	144,44

No.	Urusan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
2.	Urusan Perdagangan	Meningkatnya Produksi Dalam Negeri melalui Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	Prosentase Peningkatan Omset Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	15	21,77	145,13
			Fluktuasi Persentase Rata-rata Harga Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	12,11	-3,03	100
			Prosentase Pertumbuhan Nilai Aset Pasar Daerah	2,20	0,22	10,02
			Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Tertib Niaga	2,00	2,08	104

Sumber : Dokumen LKjIP Diskopumdag Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang meliputi dua indikator kinerja pada sasaran yang ingin dicapai, untuk indikator tingkat kenaikan koperasi yang meningkat kualitasnya tercapai 109,89% dari target yang ditetapkan sebesar 6,50% mampu terealisasi sebesar 7,14%. Sementara untuk indikator kinerja tingkat kenaikan usaha mikro yang menjadi wirausaha mampu tercapai sebesar 144,44% dari target yang ditetapkan sebesar 25% mampu dicapai sebesar 36,11 %. Sementara itu untuk urusan perdagangan dengan empat indikator sasaran yaitu indikator prosentase peningkatan omset usaha perdagangan yang difasilitasi mampu tercapai sebesar 145,13% dari target yang ditetapkan sebesar 15% mampu dicapai sebesar 21,77%, indikator fluktuasi persentase rata-rata harga barang pokok dan barang penting lainnya tercapai 100% (formulasi tren negatif) dengan target 12,11 terealisasi sebesar -3,03%.

Adapun indikator prosentase pertumbuhan nilai aset pasar daerah mampu tercapai sebesar 10,02%, dari target yang ditetapkan sebesar 2,20% mampu dicapai sebesar 0,22%, hal ini disebabkan karena kegiatan pembangunan TPS pasar Karangagung tidak lolos verifikasi pengadaan barang jasa di tingkat ULP, sedangkan indikator persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga dengan target 2,00% terealisasi sebesar 2,08% dengan tingkat capaian sebesar 104%.

Pencapaian kinerja diatas apabila dikaitkan dengan prosentase penyerapan anggaran pada kedua urusan yang ditangani tersebut dapat diketahui tingkat efisiensinya, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel II.03
Cost per Outcome Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Urusan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Efisiensi
1	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan usaha mikro yang menjadi wirausaha	Tingkat Kenaikan koperasi yang meningkat kualitasnya	109,89	93,86	16,03
			Tingkat kenaikan Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	144,44	85,65	58,79
2	Urusan Perdagangan	Meningkatnya Produksi Dalam Negeri melalui Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	Prosentase Peningkatan Omset Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	145,13	96,04	49,09
			Fluktuasi Persentase Rata-rata Harga Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	100	95,89	4,11
			Prosentase Pertumbuhan Nilai Aset Pasar Daerah	10,02	57,49	-47,47

No	Urusan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Efisiensi
			Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Tertib Niaga	104	97,09	6,91

Sumber : Penghitungan Capaian Kinerja Tahun 2024

Dari keenam indikator kinerja pada kedua urusan yang ditangani sebagaimana tabel diatas menunjukkan bahwa secara rata-rata keseluruhan menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran, akan tetapi 1 (satu) indikator kinerja sasaran persentase pertumbuhan nilai aset pasar daerah menunjukkan kondisi in-efisiensi anggaran dikarenakan rendahnya capaian realisasi kinerja, hal tersebut disebabkan adanya kegiatan revitalisasi pasar karangagung yang tidak terealisasi, hal ini disebabkan belum adanya penawaran dari penyedia yang sesuai ketentuan. Pencapaian kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama dinas tentunya juga atas dukungan dari capaian kinerja program pendukungnya pada kedua urusan tersebut, yang mana pencapaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama Tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sejumlah Rp18.598.071.776,00 yang meliputi 6 (enam) program yakni 3 (tiga) program pada bidang koperasi, 2 (dua) program pada bidang usaha mikro, kecil dan menengah, serta 1 (satu) program pada kegiatan rutin, dengan realisasi pada akhir tahun anggaran sebesar Rp14.791.889.005,00 atau 79,53% sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel II.04

Realisasi Anggaran Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun Anggaran 2024 per Program

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	290.297.880	288.218.372	99,28
2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	69.999.800	69.653.500	99,51
3.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	209.199.920	206.092.150	98,51

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.	Program Pengembangan UMKM	928.897.690	861.729.307	92,77
5.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	592.000.000	464.942.000	78,54
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	16.507.676.486	12.901.253.676	78,15
Jumlah		18.598.071.776	14.791.889.005	79,53

Sumber : Realisasi APBD Dinas Kopumdag Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk penanganan urusan koperasi dan usaha mikro kecil melalui program pendidikan dan latihan perkoperasian, program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, program pengembangan UMKM, dan program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, dan program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dari anggaran yang disediakan terserap 79,53% (tujuh puluh sembilan koma lima puluh tiga persen) dengan silpa sebesar 20,47% (dua puluh koma empat puluh tujuh persen).

Dari realisasi penyerapan anggaran tersebut tentunya berkaitan dengan pencapaian indikator kinerjanya pada masing-masing program tersebut, yang dapat digambarkan pencapaiannya pada akhir tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.05
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rasio Peningkatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	58,90	54,46	92,44
		Persentase Koperasi Sehat	27,54	23,55	85,51
2.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi Yang Berkualitas	0,30	0,34	112,16
3.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya	15,92	16,42	103,16

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	6,68	17,31	259,15
5.	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi wirausaha	18,95	20,70	109,21
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	83,85	83,90	100,06

Sumber : Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Dari tabel diatas yang menggambarkan kondisi pencapaian indikator kinerja program pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, ada beberapa faktor pendorong dan penghambat tercapainya kinerja sebagai berikut:

- a) Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan indikator rasio peningkatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi capaian kinerja 92,44% dari target 58,90% terealisasi 54,46%, dengan jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan tahun 2024 sebanyak 312 koperasi dibanding jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan tahun 2023 sebanyak 202 koperasi, ada peningkatan sebanyak 110 koperasi, dan Indikator persentase koperasi sehat capaian kinerja 85,51% dari target 27,54% terealisasi 23,55%, dengan jumlah seluruh koperasi yang sehat tahun 2024 sebanyak 130 koperasi dibanding dengan jumlah seluruh koperasi aktif sebanyak 552 koperasi, hal ini disebabkan karena terlalu banyak jumlah seluruh KSP/KSPPS/USP/USPPS yang aktif sebanyak 552 koperasi sedang dalam tahun 2024 dilaksanakan pemeriksaan koperasi sehat sebanyak 130 koperasi. Faktor keberhasilan capaian kinerja tidak lain sebagai wujud komitmen para aparatur dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi di Wilayah Kabupaten Tuban.
- b) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan indikator Persentase SDM Koperasi Yang Berkualitas dengan target sebesar 0,30% realisasi 0,34% dengan capaian sebesar 112,16% dengan jumlah SDM koperasi yang berkualitas tahun 2024 sebanyak 280 orang dibanding jumlah seluruh SDM koperasi di tahun 2024 sebanyak 83.218 orang,

faktor pendorong yaitu adanya peningkatan SDM/pengelola koperasi yang mengikuti kompetensi/peendidikan dan pelatihan manajemen tata kelola koperasi dengan baik.

- c) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan indikator Persentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya target 15,92% realisasi 16,42% dengan capaian sebesar 103,16, dengan jumlah koperasi meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset pada tahun 2024 sebanyak 225 koperasi dibanding dengan jumlah seluruh koperasi tahun 2024 sebanyak 1.370 koperasi, adapun faktor keberhasilan karena adanya kesadaran dan ketaatan pengelolaan koperasi sesuai ketentuan.
- d) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro dengan indikator Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro target 6,68% realisasi 17,31% dengan capaian sebesar 259,15, dengan jumlah pertumbuhan wirausaha baru tahun 2024 sebanyak 2.453 wirausaha dibanding dengan jumlah wirausaha secara keseluruhan pada tahun 2024 sebanyak 14.174 wirausaha, keberhasilan ini di dorong adanya peningkatan sebanyak 1.263 wirausaha dari target sebanyak 1.190 wirausaha.
- e) Program Pengembangan UMKM dengan indikator Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi wirausaha dari target 18,95% telah realisasi 20,70% dengan capaian sebesar 109,21 keberhasilan ini didorong adanya peningkatan jumlah usaha mikro menjadi wirausaha dengan kriteria masuk kurasi, sertifikasi kompetensi (skkni, digital), pemasaran produk unggulan, legalitas (HAKI, Halal, BPOM, PIRT) di tahun 2024 sebanyak 10.877 usaha mikro dibanding dengan jumlah usaha mikro keseluruhannya (hanya usaha yang berskala mikro) sebanyak 52.550 usaha mikro.
- f) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah target nilai sebesar 83,85 realisasi nilai 83,90 dengan capaian sebesar 100,06, hal ini didorong adanya peningkatan dalam peningkatan pelayanan terhadap pemerintah dan masyarakat.

Tingkat Pencapaian kinerja ini apabila dikaitkan dengan tingkat penyerapan anggaran dapat menggambarkan tingkat efisiensinya, yang dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.06
Cost per Outcome Capaian Kinerja Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rasio Peningkatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	92,44	99,28	-6,84
		Persentase Koperasi Sehat	85,51		-13,77
2.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi Yang Berkualitas	112,16	99,51	12,65
3.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya	103,16	98,51	4,65
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	259,15	92,77	166,38
5.	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi wirausaha	109,21	78,54	30,67
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	100,06	78,15	21,91

Sumber : Dokumen LKjIP Dinas Kopumdag Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian dari ketujuh indikator pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun penunjang sekretariat menunjukkan kondisi efisiensi, hanya saja pada indikator Rasio Peningkatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi capaian kinerja 92,44% dibanding capaian kinerja anggaran sebesar 99,28%, dan pada indikator persentase koperasi sehat capaian kinerja 85,51% dibanding capaian kinerja anggaran sebesar 99,28%, dari kedua capaian kinerja anggaran tersebut masih belum efisien namun demikian ada lima indikator kinerja anggaran yang sudah menunjukkan efisiensi yang sangat bagus.

b. Urusan Perdagangan

Sebagaimana uraian diatas guna mendukung pelaksanaan pembangunan urusan Perdagangan selama Tahun Anggaran 2024 telah dialokasikan anggaran sejumlah Rp7.026.443.730,00 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran telah terealisasi kedalam belanja pembangunan sebesar 69,90% atau sejumlah Rp4.911.133.269,00 yang terbagi kedalam 5 (lima) program sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel II.07
Realisasi Anggaran Urusan Perdagangan Sampai Dengan Akhir
Tahun Anggaran 2024

No.	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.781.802.940	2.749.165.781	57,49
2.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	479.771.170	460.043.750	95,89
3.	Program Pengembangan Ekspor	558.669.830	530.568.407	94,97
4.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	521.540.000	506.380.831	97,09
5.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	684.659.790	664.974.500	97,12
Jumlah		7.026.443.730	4.911.133.269	69,90

Sumber : Dokumen LKjIP Dinas Kopumdag Tahun 2024

Penyerapan anggaran kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada kelima program Urusan Perdagangan tersebut tentunya juga berdampak terhadap pencapaian kinerjanya atas target yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel II.08
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perdagangan
Tahun Anggaran 2024

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Kenaikan Nilai Produk Lokal yang difasilitasi Pemasarannya	15	15,9	105,99
2.	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor	35,29	35,29	100
3.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Perkembangan Rata-rata harga 21 Komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2,01	-3,13	100
4.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang layak fungsi	87,50	85,08	97,23
		Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran/ Dasaran	10	12,21	122,1
		Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar – Los	10	-22,71	-227,06
		Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar – Kios	10	76,68	766,85
5.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	98	90,00	91,84

Sumber : Dokumen LKjIP Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari kedelapan indikator pada 5 (lima) program urusan perdagangan, faktor pendorong dan penghambat atas capaian kinerja sebagai berikut:

- a) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan indikator Persentase Kenaikan Nilai Produk Lokal yang difasilitasi Pemasarannya dari target 15% realisasi 15,9% dengan capaian 105,99% hal ini didorong pelaksanaan kinerja sesuai yang di rencanakan dan adanya kolaborasi dengan pihak terkait (toko modern/kemitraan) dari nilai produk lokal yang difasilitasi pemasarannya tahun 2024 sebesar Rp12.580.657.819,00 Dibanding dengan nilai produk lokal yang difasilitasi pemasarannya pada tahun 2023 sebesar Rp10.854.874.320 terdapat kenaikan sebesar Rp1.725.683.499,00;
- b) Program Pengembangan Ekspor dengan indikator Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor dari target 35,29% realisasi 35,29% dengan capaian sebesar 100% faktor pendorong adanya kerjasama di berbagai pihak dengan baik, hal ini di dorong adanya peningkatan jumlah pelaku usaha ekspor dari jumlah pelaku usaha ekspor tahun 2024 sebanyak 23 pelaku usaha dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha ekspor pada tahun 2023 sebanyak 17 pelaku usaha.
- c) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan indikator Perkembangan Rata-rata harga 21 Komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan target 2,01% realisasi - 3,13 capaian sebesar 100 karena formulasi yang digunakan semakin rendah realisasi semakin baik, peningkatan kinerja ini di dorong adanya kolaborasi dan kerja tim yang baik dalam pemantauan harga dan pengendalian harga yang dibuktikan dengan perbandingan harga rata-rata tahun 2023 sebesar Rp31.180 untuk tahun 2024 sebesar Rp30.204 pada 18 jenis bapokting
- d) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan indikator Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku dengan target 98% realisasi 90% capaian sebesar 91,94 dengan jumlah UTTP bertanda tera sah pada tahun 2024 sebanyak 15.929 dibandingkan dengan jumlah UTTP yang ada sampai tahun 2024 sebanyak 17.699, hal ini disebabkan karena ada jenis alat ukur, takar, timbang yang belum masa di tera ulang.
- e) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang layak fungsi dari target sebesar 87,50% realisasi sebesar 85,08 dengan capaian sebesar 97,23 yaitu dengan jumlah sarana prasarana perdagangan yang layak fungsi tahun 2024 sebanyak 4.733 dibandingkan jumlah total sarana prasarana perdagangan yang ada,

pada tahun 2024 sebanyak 5.563 unit, ketidaktercapaian target yang ditetapkan disebabkan karena adanya bangunan atau stan yang tidak difungsikan atau di sewakan karena dalam perbaikan. Begitu juga pada indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar baik Los realisasi tahun 2024 sebesar Rp763.025.800,00 dibandingkan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp589,775.940,00 atau selisih kurang dari target sebesar Rp173.249.860,00, untuk Retribusi Pelayanan Pasar Kios realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.420.120.110,00 dibandingkan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp803.758.909,00 atau selisih lebih dari target sebesar Rp616.361.210,00 dan untuk Retribusi Pelayanan Pasar pelataran/dasaran realisasi tahun 2024 sebesar Rp328.323.300,00 dibandingkan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp292.602.950,00 atau selisih lebih dari target sebesar Rp.35.720.350,00 dari target masing-masing 10% atas target total pendapatan retribusi sebesar Rp581.688.570,00 terealisasi sebesar Rp589.775.940,00 atau 101,39% atau meningkat 1,39%. Faktor pendorong keberhasilan karena adanya monitoring secara intens atas kinerja peningkatan retribusi pasar.

Capaian indikator kinerja pada masing-masing program urusan Perdagangan ini apabila dikaitkan dengan capaian realisasi anggaran yang menggambarkan seberapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang ditetapkan dapat diketahui tingkat efisiensinya, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel II.9
Cost Per Outcome Capaian Kinerja Program Urusan Perdagangan
Tahun 2024

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi (%)
1.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Kenaikan Nilai Produk Lokal yang difasilitasi Pemasarannya	105,99	57,49	48,5
2.	Program Pengembangan Eskpor	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor	100	95,89	4,11
3.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Perkembangan Rata-rata harga 21 Komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100	94,97	5,03

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi (%)
4.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang layak fungsi	97,23	97,09	0,14
		Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran/ Dasaran	122,1		25,01
		Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar – Los	-227,06		
		Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar – Kios	766,85		669,76
5.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	91,84	97,12	-5,28

Sumber : Dokumen LKjIP Diskopumdag Tahun 2024

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari kelima program yang dilaksanakan untuk menunjang urusan perdagangan capaian kinerja anggaran telah menunjukkan efisiensi. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan pada tahun lalu atau sampai dengan Tahun 2024 serta perbandingan realisasi dengan target capaian di akhir periode renstra yang mana pada Tahun 2024 merupakan tahun keempat atas penerapan Dokumen Renstra periode 2021-2026. Selain itu, pada pertengahan Tahun 2022 diadakan evaluasi SAKIP oleh Kemenpan RB yang melakukan *review* terhadap program-program yang menunjang ketercapaian terhadap visi misi pemerintah Kabupaten Tuban.

Oleh karena itu, untuk menjaga linieritas maka dilakukan perubahan atas dokumen Renstra yang disahkan melalui Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022, yang menjadi dasar pelaksanaan evaluasi dan pengendalian di Tahun 2024, serta berdasarkan hasil realisasi pencapaian target Tahun 2023 pada beberapa program maka dilakukan *desk review* perubahan target Tahun 2023 dan 2024 yang secara keseluruhan dapat digambarkan didalam Tabel II.10 sebagai berikut :

Tabel II.10 (TC-29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2.17	Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin)	82	83.80	83.85	83,9	100,06	84.40	84.40	100
2.17.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	46	9	9	9	100	10	10	100
2.17.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	2	2	2	100	3	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	15	3	3	3	100	4	4	100
2.17.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20	4	4	4	100	3	3	100
2.17.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	100	5	17	17	100	9	9	100
2.17.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	140	122	118	118	100	114	114	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	10	2	2	2	100	12	12	100
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	1	1	1	100	4	4	100
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan an/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD (Laporan)	90	13	13	13	100	18	18	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.01.2.02.00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5	1	1	1	100	1	1	100
2.17.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (Orang)	238	172	177	177	100	2	2	100
2.17.01.2.05.00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	20	4	4	4	100	4	4	100
2.17.01.2.05.00 06	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	2	-	-	-	1	1	100
2.17.01.2.05.00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	45	52	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	7	7	7	7	100	6	6	100
2.17.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1	1	1	100	1	1	100
2.17.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1	1	1	100	1	1	100
2.17.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15	3	3	3	100	1	1	100
2.17.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	1	1	1	100	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Paket)	5	1	1	1	100	425	425	100
2.17.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	475	75	75	75	100	70	70	100
2.17.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Unit)			8	8	100	1	1	100
2.17.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)			8	8	100	24	24	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	4	4	4	4	100	4	4	100
2.17.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	10	2	2	2	100	2	2	100
2.17.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	20	4	4	4	100	12	12	100
2.17.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	10	2	2	2	100	12	12	100
2.17.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10	2	2	2	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)	115	113	113	103	91,15	4	4	100
2.17.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	2	2	100	2	2	100
2.17.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40	40	40	34	85	28	28	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	69	70	70	60	85,71	40	40	100
2.17.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	1	100
2.17.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pencatatan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	0	0	2	2	100	-	-	-
2.17.01.2.03.00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	2	2	100	-	-	-
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rasio Peningkatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi (%)	17.25	152.50	58.9	54,46	92,44	-	-	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Prosentase Koperasi Sehat (%)	34.38	21.58	27.54	23,55	85,51	13.14%	13.14%	100
2.17.03.2.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (%)	12.5	14.85	23.60	22,77	96,49	37,79	37,79	100
		Jumlah Koperasi yang Berkategori Sehat	-	-	-	-	-	180	180	100
2.17.03.2.01.00 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	170	202	321	321	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.03.2.01.04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-	-	-	-	-	515	515	100
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Prosentase Koperasi Sehat (%)	0.4	0.75	-	-	-	-	-	-
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase usaha simpan pimjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (%)	13.97	11.32	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.04.2.01.00 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	190	160	-	-	-	-	-	-
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Prosentase SDM Koperasi Yang Berkualitas (%)	0.11	0.24	0.30	0,34	112,16	8,81	8,81	100
2.17.05.2.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (%)	0.5	0.33	0.40	0,34	84,38	0,34	0,34	100
		Persentase Pengelola Koperasi yang Dibina	-	-	-	-	-	17,23	17,23	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.05.2.01.00 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	1620	820	230	280	121,74	428	428	100
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Prosentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya (%)	19.85	15.44	15.92	16,42	103,16	-	-	-
		Persentase Koperasi Yang Berkualitas (%)	-	-	-	-	-	35,10	35,10	100
2.17.06.2.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitas Kemitraan (%)	6.80	5.15	5.28	6,86	129,95	6,86	6,86	100
		Prosentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan (%)	4.1	3.68	3.95	6,13	155,22	6,13	6,13	100
		Persentase Koperasi Aktif	-	-	-	-	-	50,58	50,58	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.06.2.01.00 01	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	300	190	180	251	139,44	-	-	-
		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-	-	-	-	-	92	92	100
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro (%)	7.5	24.95	6.68	17,31	259,15	-	-	-
		Persentase Usaha Mikro yang Terstandarisasi	-	-	-	-	-	22,02	22,02	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.07.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra (%)	0.42	1.11	0.34	1,94	569,83	-	-	-
		Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi standarisasi usaha	-	-	-	-	-	22,68	22,68	100
2.17.07.2.01.00 02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	300	585	340	340	100	70	70	100
2.17.07.2.01.00 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	200	21597	200	200	100	50	50	100
2.17.07.2.01.00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah SDM yg Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan pemangku kepentingan	1100	1702	340	480	141,18	229	229	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.07.2.01.00 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Ushaa Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan (orang)	930	170	185	185	100	400	400	100
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi wirausaha	7.5	17.95	18.95	20,07	109,21	19,95	19,95	100
2.17.08.2.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	25.14	26.03	23.93	24,05	100,49	1,71	1,71	100
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	2.1	1.82	1.40	1,94	139,05	24,53	24,53	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	115	886	550	1433	260,55	-	-	-
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	-	-	-	38	-	2	2	100
3	Urusan Pemerintahan Pilihan									
3.3	Bidang Urusan Perdagangan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang layak fungsi (%)	78.97	85.34	87.50	85,08	97,23	-	-	-
		Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran/ Dasaran (%)	10	13.91	10	12.21	122,1	-	-	-
		Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Los (%)	10	1.55	10	-22,71	-227,1	-	-	-
		Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Kios (%)	10	-1.32	10	76,68	766,8	-	-	-
		Persentase Prasarana Distribusi Perdagangan yang Difungsikan	-	-	-	-	-	58,33	58,33	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30.03.2.01	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Daerah yang Terbangun dan Dikelola (Pasar)	9	9	10	7	70	9	9	100
		Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara	-	-	-	-	-	3	3	100
3.30.03.2.01.00 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	9	9	10	10	100	11	11	100
3.30.03.2.02	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pembinaan terhadap pedagang pasar daerah (Orang)	872	165	175	325	185,71	-	-	-
		Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang mengikuti pembinaan	145	145	145	45	100	-	-	-
		Jumlah Retribusi Pasar Daerah	-	-	-	-	-	4.862.518.800	4.862.518.800	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	44	9	7	7	100	12	12	100
3.30.04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Perkembangan Rata-rata harga 21 Komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%)	< 13	< 13 (5.34)	< 13 (12,01)	-3,13	100	12,13	12,13	100
		Rata-rata Harga Bahan Pokok dan Penting	-	-	-	-	-	30.300	30.300	100
3.30.04.2.0002	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota	Prosentase penyaluran LPG 3 kg bersubsidi (%)	100	100	0	0	0	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Prosentase Jenis Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali harga dan stoknya	100	0	100	100	100	-	-	-
		Data rata-rata harga bapokting per komoditas (Dokumen)	1	1	1	1	100	-	-	-
		Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan berdasarkan Hasil Catatan Pemantauan Harga Bahan Pokok	-	-	-	-	-	15	15	100
3.30.04.2.02.00 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	60	12	12	12	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	60	12	12	12	100	1	1	100
3.30.04.2.03	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	34.19	55.24	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan berdasarkan Hasil Catatan Pemantauan Distribusi Pupuk	-	-	-	-	-	2	2	100
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	20	4	4	4	100	4	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Prosentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor (%)	7	30	35.29	35,29	100	39,18	39,18	100
		Persentase Pelaku Usaha Ekspor (%)	-	-	-	-	-	32,43	32,43	100
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transaksi Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang (Milyar)	12.21	2	19.63	21,43	109,15	22,3	22,3	100
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pengembangan Ekspor	-	-	-	-	-	99	99	100
3.30.05.2.01.00 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	30	6	6	6	100	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30.05.2.01.00 04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	30	6	6	9	150	2	2	100
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina (Pelaku Usaha)	200	40	40	40	100	-	-	-
3.30.05.2.01.00 06	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	120	40	40	40	100	40	40	100
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku (%)	98	43.93	98	90,00	91,84	91	91	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan tera/tera ulang (%)	10	6.44	-	-	-	-	-	-
3.30.06.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (%)	100	43.93	81	77,98	96,28	90,05	90,05	100
3.30.06.2.01.00 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	17690	7772	14336	13802	17345	12429	12429	100
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase Kenaikan Nilai Produk Lokal yang difasilitasi Pemasarannya (%)	5.42	1.53	15	15,9	105,99	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Produk Lokal yang Dipromosikan	-	-	-	-	-	26,40	26,40	100
3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah transaksi pada pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Milyar)	14	2.6	12.48	12,58	100,81	12,70	12,70	100
		Jumlah Pelaku Usaha yang Bermitra	-	-	-	-	-	136	136	100
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	370	192	74	74	100	74	74	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30.07.2.01.00 06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	n/a	n/a	80	80	100	80	80	100

Sumber : Perhitungan Capaian Kinerja Diskopumdag

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

1. Adanya sinergi dengan stakeholder terkait sebagai mitra kerja dalam memberikan fasilitasi kepada masyarakat;
2. Komitmen aparatur dalam mengoptimalkan jejaring informasi dan potensi sumber daya yang ada; dan
3. Terjalannya koordinasi internal bidang dalam pembagian pelaksanaan tugas fungsi.

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

1. Tidak terpenuhi target atas revitalisasi Pasar Karangagung dikarenakan pada tahap penawaran tender tidak ada penyedia yang lulus sesuai kualifikasi, sedangkan tahap perencanaan sudah dilaksanakan.

Implikasi atas kondisi diatas yaitu:

1. Rendahnya nilai serapan anggaran, sehingga menyebabkan SILPA; dan
2. Tidak tercapainya target indikator kinerja sasaran persentase pertumbuhan nilai aset pasar daerah.

Tindak lanjut/kebijakan yang diperlukan:

1. Melakukan evaluasi terhadap realisasi tahunan yang masih rendah dan merumuskan strategi untuk peningkatan realisasi kinerja pada tahun berikutnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban dalam menangani dua urusan yakni urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Urusan Perdagangan, tentunya dapat dilihat dari kinerja pelayanan yang telah dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang menangani dua urusan tersebut melalui capaian kinerja pelayanan dari urusan tersebut yang dapat diukur melalui indikator kinerja pelayanan pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, diantaranya adalah: tingkat kenaikan koperasi yang meningkat kualitasnya dan tingkat kenaikan usaha mikro yang menjadi wirausaha sebagai indikator sasaran, serta indikator program yaitu: rasio peningkatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi; persentase koperasi sehat; persentase SDM koperasi yang berkualitas; persentase koperasi yang meningkat kualitasnya; rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro; persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha; dan nilai akuntabilitas kinerja internal pemerintah perangkat daerah. Memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah periode Tahun 2025-2029 ada beberapa perubahan tahun 2025 indikator sasaran yaitu: persentase koperasi yang berkualitas dan persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha mapan, begitu juga pada indikator program yaitu: persentase koperasi yang berkualitas; persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitasnya; dan persentase usaha mikro yang terstandarisasi.

Sedangkan pada urusan perdagangan ada beberapa indikator sasaran yaitu: prosentase peningkatan omset usaha perdagangan yang difasilitasi; fluktuasi persentase rata-rata harga barang pokok dan barang penting lainnya; prosentase pertumbuhan nilai aset pasar daerah; dan persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga, yang dalam pencapaian indikator sasaran tersebut diungkit dengan indikator program antara lain: persentase kenaikan nilai produk lokal yang difasilitasi pemasarannya; persentase peningkatan pelaku usaha ekspor; perkembangan rata-rata harga komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting; persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang layak fungsi; persentase peningkatan pendapatan retribusi pelayanan pasar - pelataran/dasaran; persentase peningkatan pendapatan retribusi pelayanan pasar - los; persentase peningkatan pendapatan retribusi pelayanan pasar - kios; dan persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku.

Memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah periode Tahun 2025-2029, ada beberapa perubahan tahun 2025 indikator sasaran yaitu: tingkat fluktuasi harga komoditas bapokting dan indeks kepuasan masyarakat (IKM) perangkat daerah, begitu juga pada indikator program yaitu: rata-rata harga bahan pokok dan penting; dan nilai ekspor barang.

Dari beberapa indikator kedua urusan yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban tersebut dapat digambarkan capaian kinerjanya sampai dengan akhir Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel II.11 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n, tw 2)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
I.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
	Indikator Sasaran											
1.	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	IKU		0,52	0,54	0,56	0,58	0,52	belum rilis	0,56	0,58	Target tahun 2026 sesuai Berita Acara Tim Sakip Kabupaten (19 Agustus 2025) tentang Kesepakatan penetapan Tujuan, Sasaran, Program Perangkat Daerah beserta indikator dan targetnya untuk dituangkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2025-2029
2.	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha mapan	IKU		0,39	19,03	19,79	20,55	0,39	belum rilis	19,79	20,55	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-	√	87,59	88,29	88,99	89,69	87,59	belum rilis	88,99	89,69	
	Indikator Program											
1.	Prosentase Koperasi yang Berkualitas	-	√	33,43	35,10	36,65	38,10	33,43	26,36	36,65	38,10	
2.	Prosentase Koperasi Sehat (%)	-	√	9,49	13,14	16,79	20,44	9,49	belum rilis	16,79	20,44	
3.	Prosentase SDM Koperasi Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	-	√	6,81	8,81	10,81	12,81	6,81	belum rilis	10,81	12,81	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n, tw 2)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
4.	Persentase Usaha Mikro yang Terstandarisasi	-	√	19,76	22,02	23,35	24,71	19,76	belum rilis	23,35	24,71	Target tahun 2026 sesuai Berita Acara Tim Sakip Kabupaten (19 Agustus 2025) tentang Kesepakatan penetapan Tujuan, Sasaran, Program Perangkat Daerah beserta indikator dan targetnya untuk dituangkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2025-2029
5.	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin)	-	√	83,85	84,4	84,9	85,4	83,90	belum rilis	84,9	85,4	
	Urusan Perdagangan											
	Indikator Sasaran											
1.	Tingkat Fluktuasi Harga Komoditas Bapokting	-	√	-3,13	0,9	0,9	0,9	-3,13	-7,20	0,9	0,9	
2.	Nilai Ekspor Barang	-	√	42,41	53,32	64,22	75,12	42,41	belum rilis	64,22	75,12	
	Indikator Program									-	-	
1.	Prosentase Produk Lokal yang Dipromosikan (%)	-	√	1,12	26,4	31,33	36,43	1,12	belum rilis	31,33	36,43	
2.	Persentase Prasarana Distribusi Perdagangan yang Difungsikan	-	√	50	58,33	75	91,67	50	50	75	91,67	
3.	Rata-rata Harga Bahan Pokok dan Penting	-	√	30.204	30.300	30.400	30.500	30.204	28.029	30.400	30.500	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n, tw 2)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
4.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	-	√	90	91	92	93	90	33,95	92	93	Target tahun 2026 sesuai Berita Acara Tim Sakip Kabupaten (19 Agustus 2025) tentang Kesepakatan penetapan Tujuan, Sasaran, Program
5.	Prosentase Pelaku Usaha Ekspor	-	√	31,08	32,43	35,14	37,84	31,08	belum rilis	35,14	37,84	Perangkat Daerah beserta indikator dan targetnya untuk dituangkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2025-2029

Sumber : Hasil Analisa Capaian Kinerja Diskopumdag sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, tentunya harus memperhatikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta isu-isu yang berkembang, yang menggambarkan potensi dan tantangan yang dihadapi dan memerlukan perhatian karena sangat berpengaruh dan berdampak secara tidak langsung pada masyarakat. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 dengan tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” sesuai dengan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, isu strategis pembangunan dan arah kebijakan RPJMN tahun 2025-2029 yang memberi tekanan pada 2 (dua) kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Untuk menjaga implementasi tema RKP Tahun 2026, maka ditetapkan sasaran Pembangunan Nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2026 melalui kerangka ekonomi makro antara lain: Laju pertumbuhan ekonomi 5,8-6,3%, PDRB perkapita (juta) 5.870 USD, Tingkat kemiskinan 6,50-7,50%, Tingkat pengangguran terbuka 4,44-4,96%, Rasio gini 0,377-0,380, Indeks Modal Manusia (IMM) 0,57. Penurunan Intensitas Emisi GRK 37,14%, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,67%. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029, maka ditetapkan Program Strategis Nasional yang berfungsi sebagai pengungkit investasi lintas sektor yang dibiayai oleh pemerintah (APBN), BUMN, dan sektor swasta melalui berbagai skema seperti KPBU dan *blended finance*. Arah kebijakan PSN dalam RKP Tahun 2026 mencerminkan penajaman proyek yang strategis, terukur, dan berdampak terhadap sasaran pembangunan nasional, terutama dalam mendukung program prioritas Presiden dan Program hasil terbaik cepat fokus diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan, serta pemerataan pembangunan antar wilayah. Telaah prioritas pembangunan Jawa Timur Tahun 2026 fokus pada, “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Produktifitas menuju Kemandirian Pangan dan Energi” dengan mengoptimalkan sektor agro dengan meningkatkan produksi komoditas unggulan seperti padi, jagung, tebu, kedelai, dan kopi melalui modernisasi pertanian, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Sejalan dengan kebijakan nasional tahun 2026, Jawa Timur akan mendorong hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing serta menciptakan lapangan kerja. Langkah strategis arah kebijakan Jawa Timur Tahun 2026 diantaranya:

- 1) Perluasan sistem e-government dan layanan publik digital;
- 2) Penguatan kualitas regulasi dan inisiatif penyederhanaan;
- 3) Peningkatan pengelolaan keuangan publik dan transparansi;
- 4) Implementasi manajemen berbasis kinerja di institusi publik;
- 5) Pengembangan mekanisme umpan balik warga dan partisipasi publik;
- 6) Penguatan kapasitas pemerintahan lokal dan desentralisasi;
- 7) Peningkatan mekanisme koordinasi antar pemerintah;
- 8) Implementasi inisiatif data terbuka dan tata kelola data;
- 9) Penguatan program kerukunan beragama dan toleransi; dan
- 10) Pengembangan ketahanan masyarakat melalui modal sosial.

Adapun arahan pembangunan Kabupaten Tuban tahun 2026 ada 8 arah, yang linier dengan tugas fungsi dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan adalah: “Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (Industri pengolahan serta informasi dan komunikasi) 349 berdaya saing tinggi dan mendorong investasi pada sektor potensial (pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalan, konstruksi serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib”.Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Tuban tahun 2026 ada 6 (enam) yaitu:

1. Optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah;
2. Optimalisasi kebijakan efisiensi belanja pegawai daerah;
3. Peningkatan kualitas program perlindungan sosial sebagai upaya akselerasi penurunan kemiskinan;
4. Penguatan kerjasama strategis dalam rangka peningkatan akses pendidikan untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM;
5. Penguatan kolaborasi pentahelix dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan peningkatan kualitas infrastruktur;
6. Peningkatan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas aparatur dan digitalisasi layanan publik.

Sinkronisasi prioritas RKPD dan Program Strategis Kepala Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan terletak pada Prioritas Kabupaten yaitu: “Optimalisasi Pengelolaan Potensi Lokal (Sektor Primer Pertanian) melalui Hilirisasi Komoditas Unggul” dengan Program Prioritas Kepala Daerah pada “(PP4) Program pengembangan wisata, ekonomi kreatif, UMKM, koperasi, BUMDes, dan kemitraan dengan dunia usaha untuk menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha”, yang bersinergi dengan Program Perangkat Daerah yaitu:

- 1) Program Pengembangan Ekspor;
- 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- 4) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- 5) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dan
- 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro.

Kegiatan pada program diatas yang diakomodir rencana kerja tahun 2026 diatas sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 3) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya;
- 4) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota;
- 5) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan;
- 7) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 8) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

Sub kegiatan teknis pada program diatas yang diakomodir pada rencana kerja tahun 2026 sebagai berikut:

- 1) Pameran Dagang, Peningkatan Citra Produk Ekspor;
- 2) Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 3) Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Srana Distribusi Perdagangan;
- 4) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
- 5) Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi;
- 6) Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang;
- 7) Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro;
- 9) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro;
- 10) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
- 11) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan.

Beberapa program prioritas Perangkat Daerah yang menjadi isu-isu pelaksanaan pembangunan, diantaranya adalah:

1. Pada urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yaitu:
 - a. Masih banyaknya koperasi yang terkategori tidak aktif (didas 50% dari total koperasi yang ada) hal ini sebagai akibat rendahnya kesadaran dan pemahaman pengelola terhadap ketentuan perkoperasian yang seharusnya dilaksanakan serta belum optimalnya pendampingan kelembagaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap koperasi yang ada di Wilayah Kabupaten Tuban, hal ini berdampak pada tidak beroperasinya koperasi atau pasif yang mengakibatkan kerugian bagi anggota koperasi;
 - b. Koperasi cenderung hanya menjalankan usaha simpan pinjam akibat kurangnya kemampuan SDM koperasi dalam mengelola unit usaha maupun manajemennya, hal ini berdampak pada kurangnya koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggota dan peningkatan volume usaha;

- c. Adanya Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 tentang Koperasi Merah Putih sebagai Koperasi yang dibentuk ditingkat desa atau kelurahan, masih belum terbentuk strukturisasi kelembagaan dan pendidikan SDM koperasi, hal ini berdampak pada manajemen dan tata kelola koperasi sesuai ketentuan;
 - d. Masih banyaknya usaha mikro yang belum memiliki legalitas dan sertifikasi usaha sehingga kualitas produk yang dihasilkan cenderung masih di bawah standar pasar modern;
 - e. Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Tuban sehingga perlu adanya pengembangan kewirausahaan sebagai upaya menciptakan lapangan pekerjaan;
 - f. Jumlah Pedagang Kaki Lima (PK-5) yang semakin bertambah tidak sebanding dengan ruang/tempat usaha yang terbatas dan belum adanya upaya penataan yang memadai di area publik, sangat berdampak pada ketertiban umum dan tata kota yang sesuai ketentuan;
 - g. Masih rendahnya akses permodalan dan pemasaran koperasi dan usaha kecil dan menengah, sangat berpengaruh terhadap peningkatan omset usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah.
2. Pada urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan diantaranya:
- a. Masih terbatasnya jaringan pemasaran baik secara *online* maupun *offline*, akibatnya omset pelaku usaha tidak meningkat;
 - b. Terbatasnya kapasitas pelaku usaha untuk memenuhi kualifikasi standar ekspor;
 - c. Terbatasnya kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kualifikasi persyaratan dan prosedur untuk ekspor barang, hal ini berpengaruh terhadap pengembangan produk ekspor;
 - d. Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana pasar daerah sebagai penunjang perdagangan yang representatif menuju pasar grosir dan eceran, yang berdampak pada distribusi barang ke masyarakat dan pengendalian harga bahan pokok;
 - e. Belum optimalnya manajemen pengelolaan pasar daerah yang berdampak pada penerimaan PAD atas retribusi pasar dan menurunnya pembeli pada pasar daerah;
 - f. Pemahaman dan kesadaran masyarakat selaku konsumen terhadap upaya melindungi kepentingannya pada umumnya masih kurang, yang berakibat kerugian pada pembeli atas barang yang dibeli tidak sesuai ukuran atau takaran;
 - g. Kesadaran pedagang terhadap pentingnya kalibrasi alat ukur yang dimiliki pada umumnya masih rendah, berakibat adanya kecenderungan ketidaktepatan ukuran/takaran yang merugikan konsumen.

Berdasarkan penelaahan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban maka tantangan dan peluang pada pelaksanaan pembangunan diantaranya adalah:

1. Tantangan

- a. Keterbatasan sumber daya manusia, yaitu kualitas SDM pelaku usaha (pengelola koperasi, pelaku usaha mikro dan pedagang serta pengelola pasar daerah) yang belum profesional dan kurangnya keterampilan digital serta manajemen usaha pada pelaku usaha;
- b. Akses pembiayaan/permodalan, yaitu pelaku usaha (pelaku usaha mikro, pengelola koperasi, dan pedagang pasar) mengalami kesulitan mendapatkan akses pembiayaan;
- c. Standardisasi dan kualitas, yaitu keterbatasan dalam standardisasi produk yang berpotensi menghambat daya saing di pasar nasional/internasional;
- d. Persaingan, yaitu persaingan yang ketat di pasar domestik maupun global, terutama dengan produk-produk dari luar;
- e. Infrastruktur, yaitu keterbatasan infrastruktur yang dapat menghambat kelancaran distribusi arus barang dan jasa, serta perlindungan konsumen; dan
- f. Integrasi data, yaitu adanya perbedaan definisi UMKM antarlembaga dan belum adanya basis data yang terintegrasi dapat menyulitkan koordinasi dan penyusunan kebijakan.

2. Peluang

- a. Peluang kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan komunitas untuk pelatihan dan pendampingan;
- b. Kolaborasi dan kemitraan dengan lembaga jasa keuangan/perbankan maupun stakeholder lain dalam penyediaan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha;
- c. Peningkatan standarisasi legalitas dan kualitas produk usaha mikro, khususnya bagi produk unggulan daerah agar lebih berdaya saing;
- d. Perluasan pasar, yaitu menggunakan berbagai strategi untuk memperluas akses pasar, baik di tingkat internasional maupun domestik;

- e. Peningkatan kualitas infrastruktur melalui optimalisasi pengelolaan dengan kolaborasi lintas sektor dalam rangka mewujudkan kelancaran distribusi arus barang; dan
- f. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, peningkatan daya saing UMKM akan berimplikasi pada peningkatan rasio kewirausahaan sehingga berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja. Perlu adanya kolaborasi dalam perencanaan, perumusan kebijakan/regulasi, data teknis dalam pelaksanaan peningkatan daya saing usaha mikro.

Dari rangkuman beberapa permasalahan yang masih dihadapi tersebut, serta peluang dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan dapat dirumuskan beberapa isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam mencapai prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 yaitu program pengembangan wisata, ekonomi kreatif, UMKM, koperasi, BUMDes, dan kemitraan dengan dunia usaha untuk menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, sebagaimana berikut:

1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan tata kelola koperasi dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi baik melalui pengembangan produk dan usaha, revitalisasi usaha, maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
2. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru; dan
3. Penataan Pedagang Kaki Lima (PK-5) di kawasan area publik untuk menjaga ketertiban umum dan tata kota yang bersih dan nyaman;
4. Penguatan manajemen pengelolaan pasar untuk efektifitas kesatuan harga barang dan optimalisasi PAD;
5. Penyediaan sarana distribusi perdagangan yang representatif dalam menunjang pasar grosir dan eceran;
6. Pemantauan dan intervensi terhadap kelangkaan dan perkembangan harga komoditas bahan pokok dan penting;
7. Pengembangan informasi peluang pasar dan jaringan pemasaran baik secara *online* maupun *offline*; dan
8. Perlindungan konsumen melalui pengawasan terhadap penggunaan zat-zat berbahaya, serta ketepatan takaran dan timbangan.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 yang memuat rancangan program dan kegiatan, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah tahun 2026. Guna mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026, serta Renstra PD Tahun 2025-2029, maka dilakukan proses penyempurnaan melalui penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan sebagaimana dijabarkan dalam tabel II.12 berikut:

Tabel II.12 (T-C.31)
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Tuban

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cata tan Penti ng
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
2.1 7.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Perangkat Daerah	84,90 Poin	16.914.005.227	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	84,90 Poin	16.914.005.227	
2.1 7.0 1.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	9 Dokumen	61.593.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	9 Dokumen	61.593.800	
000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	19.265.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	19.265.000	
000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	42.328.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	42.328.800	
2.1 7.1. 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Jenis	13.980.746.542	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Jenis	13.980.746.542	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang/bln	13.843.788.986	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang/bln	13.843.788.986	
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	103.660.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	103.660.000	
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semeste SKPD	23 Laporan	33.297.556	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semeste SKPD	23 Laporan	33.297.556	
2.1 7.1. 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Layanan kepegawaian	1 Jenis	3.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Layanan kepegawaian	1 Jenis	3.500.000	
0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	140 Dokumen	3.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	172 Dokumen	3.500.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
0007	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	
2.1 7.1. 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	5 Jenis	293.917.930	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	5 Jenis	293.917.930	
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	70.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	70.000.000	
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	95.893.250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	95.893.250	
0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	44.996.280	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	44.996.280	
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan	70.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan	70.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (opsional)		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	13.028.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	13.028.400	
2.1 7.1. 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Jenis	326.882.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Jenis	326.882.400	
000 5	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	156.787.500	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	156.787.500	
000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	170.094.900	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	170.094.900	
2.1 7.0 1.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	2 Jenis	1.945.290.685	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	2 Jenis	1.945.290.685	
000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	566.941.100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	566.941.100	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.378.349.585	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.378.349.585	
2.1 7.1. 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)	3 Jenis	302.073.870	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)	3 Jenis	302.073.870	
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	152.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	152.000.000	
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	60.072.300	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	60.072.300	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	90.001.570	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tuban, Kelurahan Latsari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	90.001.570	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Prosentase Koperasi Sehat	16,79%	55.862.500	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Prosentase Koperasi Sehat	16,79%	55.862.500	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Koperasi yang Berkategori Sehat	230 Unit Usaha	55.862.500	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Koperasi yang Berkategori Sehat	230 Unit Usaha	55.862.500	
0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	557 Unit Usaha	55.862.500	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	557 Unit Usaha	55.862.500	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
2.1 7.0 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya	4,87%	859.719.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya	10,81%	859.719.000	
2.1 7.5. 2.0 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SDM Koperasi yang meningkat Kapasitasnya	200 Orang	859.719.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengelola Koperasi yang Dibina	27,64%	859.719.000	
000 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	428 Orang	859.719.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	428 Orang	859.719.000	
2.1 7.0 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Koperasi Produktif	52,77 %	484.212.100	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Koperasi yang Berkualitas	36,65 %	484.212.100	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
2.1 7.0 6.2. 01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	245 Unit Usaha	484.212.100	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi Aktif	52,04%	484.212.100	
000 5	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	290 Unit Usaha	484.212.100	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	290 Unit Usaha	484.212.100	
2.1 7.0 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Usaha Mikro yang Terstandarisasi	23,35	1.865.812.600	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Usaha Mikro yang Terstandarisasi	23,35	1.865.812.600	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
2.1 7.0 7.2. 01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi standarisasi usaha	2,18%	1.865.812.600	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi standarisasi usaha	25,04%	1.865.812.600	
000 2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	300 Unit Usaha	65.220.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	300 Unit Usaha	65.220.000	
000 3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	300 Unit Usaha	128.025.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	300 Unit Usaha	128.025.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	580 Orang	764.269.800	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	580 Orang	764.269.800	
0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	800 Orang	908.297.800			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	800 Orang	908.297.800	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang layak fungsi	80,68 %	16.797.308.948	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Prasarana Distribusi Perdagangan yang Difungsikan	75,00 %	16.797.308.948	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
3.3 0.0 3.2. 01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dipelihara	3 Unit	15.993.510.435	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dipelihara	3 Unit	15.993.510.435	
000 1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	10 Unit	15.993.510.435	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	10 Unit	15.993.510.435	
3.3 0.0 3.2. 02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase Capaian Retribusi Sarana Distribusi Perdagangan	95%	803.798.513	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Retribusi Pasar Daerah	5.201.281.951	803.798.513	
000 1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kec. Tuban Kel. Latsari	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	803.798.513	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kec. Tuban Kel. Latsari	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	803.798.513	
3.3 0.0 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Rata-rata Harga Bahan Pokok dan Penting	30.400 Rupiah	561.505.550	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Rata-rata Harga Bahan Pokok dan Penting	30.400 Rupiah	561.505.550	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
3.3 0.0 4.2. 02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota		Jumlah jenis komoditas bapokting yang terpantau perkembangan harga	22 Jenis	503.520.300	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan berdasarkan Hasil Catatan Pemantauan Harga Bahan Pokok	15 Rekomendasi	503.520.300	
000 1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	503.520.300	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Tuban, Latsari	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	503.520.300	
3.3 0.0 4.2. 03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Realisasi Pupuk Bersubsidi sesuai Alokasi	93,50 %	57.985.250	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan berdasarkan Hasil Catatan Pemantauan Distribusi Pupuk	2 Rekomendasi	57.985.250	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kec. Tuban Kel. Latsari	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	57.985.250	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kec. Tuban Kel. Latsari	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	57.985.250	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Prosentase Pelaku Usaha Ekspor	25%	214.928.820	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase Pelaku Usaha Ekspor	35,14%	214.928.820	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pengembangan Ekspor	0,11%	214.928.820	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pengembangan Ekspor	153 Pelaku Usaha	214.928.820	
0002	Pameran Dagang Nasional	Kec. Tuban Kel. Latsari	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	195.855.220	Pameran Dagang Nasional	Kec. Tuban Kel. Latsari	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	195.855.220	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kec. Tuban Kel. Latsari	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	20 Produk	19.073.600	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kec. Tuban Kel. Latsari	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	20 Produk	19.073.600	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	92%	167.572.800	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	92%	167.572.800	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Prosentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (%)	91,05%	167.572.800	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Prosentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (%)	91,05%	167.572.800	
0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	12567 Unit	167.572.800	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	12567 Unit	167.572.800	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
3.3 0.0 7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Produk Lokal yang Dipromosikan	31,33%	293.676.300	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Produk Lokal yang Dipromosikan	31,33%	293.676.300	
3.3 0.0 7.2. 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah transaksi pada pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Milyar)	12.92 Milyar	293.676.300	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang Bermitra	146 Pelaku Usaha	293.676.300	
000 5	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kec. Tuban Kel. Latsari	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40 UMKM	293.676.300	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kec. Tuban Kel. Latsari	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40 UMKM	293.676.300	
			JUMLAH		38.214.603.845					38.214.603.845	

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai rancangan awal RKPD Tahun 2026 yang memuat rancangan program dan kegiatan, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2026 yang menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah tahun 2026, yang mana dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan dengan 7 kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, pada rancangan awal RKPD dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah target: 84,90 poin, pagu anggaran sebesar Rp.16.914.005.227,00 sesuai hasil analisa kebutuhan;
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan 1(satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan pada rancangan awal RKPD dengan indikator Prosentase Koperasi Sehat target: 16,79% pagu anggaran sebesar Rp55.862.500,00 sesuai hasil analisa kebutuhan;
3. Program Pendidikan dan Latihan dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan pada rancangan akhir RKPD dengan indikator Persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya, ada perubahan target menjadi 10,81%, pagu anggaran sebesar Rp859.719.000,00 sesuai hasil analisa kebutuhan;
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, terdapat penyesuaian indikator pada rancangan akhir RKPD menjadi indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas target: 36,65% pagu anggaran sebesar Rp484.212.100,00 sesuai hasil analisa kebutuhan;
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan 1(satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan pada rancangan awal RKPD dengan indikator Persentase Usaha Mikro yang Terstandarisasi target: 23,35% pagu anggaran sebesar Rp1.865.812.600,00 sesuai hasil analisa kebutuhan;
6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, terdapat penyesuaian indikator pada rancangan akhir RKPD dengan indikator Persentase Prasarana Distribusi Perdagangan yang Difungsikan target: 75,00% pagu anggaran sebesar Rp16.797.308.948,00 sesuai hasil analisa kebutuhan;

7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan pada rancangan awal RKPD dengan indikator Rata-rata Harga Bahan Pokok dan Penting target: Rp30.400 pagu anggaran sebesar Rp561.505.550,00 sesuai hasil analisa kebutuhan;
8. Program Pengembangan Ekspor dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan pada rancangan awal RKPD dengan indikator Persentase Pelaku Usaha Ekspor target: 35,14% pagu anggaran sebesar Rp214.928.820,00 sesuai hasil analisa kebutuhan;
9. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan pada rancangan awal RKPD dengan indikator Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku target: 92% pagu anggaran sebesar Rp167.572.800,00 sesuai hasil analisa kebutuhan; dan
10. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan pada rancangan awal RKPD dengan indikator Persentase Produk Lokal yang Dipromosikan target: 31,33% pagu anggaran sebesar Rp293.676.300,00 sesuai hasil analisa kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai rangkaian penyusunan perencanaan yang dimulai dari pemerintahan terendah di desa/kelurahan melalui musyawarah pembangunan tingkat desa yang menghasilkan keluaran berupa usulan program/kegiatan pada tingkat desa/kelurahan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan musyawarah perencanaan pembangunan pada tingkat kecamatan yang menghasilkan keluaran berupa usulan prioritas pembangunan pada tingkat kecamatan, yang mengakomodir berbagai usulan dari pemangku kepentingan, kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi yang ada di tingkat kecamatan, yang perlu disinkronisasi dengan usulan pada tingkat perangkat daerah selaku unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang ditanganinya, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya serta analisa kebutuhan prioritas program yang akan dilaksanakan mengacu pada prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut.

Berdasarkan usulan dari masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan pada tingkat kecamatan dan pokok pikiran DPRD terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang dapat diakomodir dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.13 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		NIHIL			

Sumber : Rekap Usulan Musrenbangcam dan Pokir Dewan RKPD Tahun 2026

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai upaya menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, Penetapan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 berpedoman pada visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tuban, yaitu: “Tuban Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, serta visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban tahun 2025 - 2029, yaitu “Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan”. Dalam rangka mengimplementasikan visi pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029 secara nyata dan terarah, diperlukan langkah strategis yang dituangkan ke dalam bentuk misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Tuban selama periode lima tahun mendatang sebagai berikut:

Misi 1 : “Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan”.

Misi 2: “Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif”.

Misi 3: “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal”.

Misi 4: “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Memperkuat Sistem Pengawasan yang Efektif”.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, setiap rumusan misi Kepala Daerah yang ditetapkan perlu dijabarkan secara lebih operasional kedalam tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah sebagai tahapan strategis yang memberikan arah pencapaian misi secara sistematis dan terukur selama periode perencanaan lima tahunan sehingga setiap misi yang telah dirumuskan akan memiliki serangkaian tujuan sebagai capaian antara serta sasaran sebagai indikator spesifik yang ingin diwujudkan dalam pembangunan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tuban
Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029 beserta Indikatornya

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 1 : Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan Kabupaten Tuban layak huni	1. Indeks Layak Huni (ILH)	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	1. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 3. Penurunan Emisi GRK Kumulatif
Misi 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas - Luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah serta percepatan pengentasan kemiskinan	2. PDRB Per Kapita 3. Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil dan berkelanjutan.	4. Laju Pertumbuhan Ekonomi 5. Gini Ratio 6. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi
			Meningkatnya kemandirian desa dan ketahanan pangan daerah	7. Persentase Desa Mandiri 8. Indeks Ketahanan Pangan
			Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 10. Rasio Kewirausahaan 11. Nilai Tukar Petani (NTP)

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	12. Indeks Kesejahteraan Sosial
Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai - nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal.	Mewujudkan sumber daya manusia unggul	4. Indeks Pembangunan Manusia	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	13. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun 14. Harapan Lama Sekolah (HLS) 15. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 16. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
			Terwujudnya kesehatan berkualitas yang merata	17. Usia Harapan Hidup (UHH)
			Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	18. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
			Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis	19. Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 4 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Memperkuat Sistem Pengawasan yang Efektif.	Mewujudkan pemerintahan yang adaptif dan melayani	5. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	20. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah 21. Opini BPK 22. Survei Penilaian Integritas (SPI)
			Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	23. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah 24. Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Terwujudnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	25. Indeks Pelayanan Publik (IPP) 26. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 27. Indeks Pemerintah Digital

Sumber : RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029

Berkenaan dengan RPJMD sebagaimana disajikan di atas, maka penetapan tema RKPD 2026 juga mempertimbangkan keselarasan semua dokumen perencanaan dari tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten Tuban, sebagaimana *logical framework analysis* (LFA) berikut:

Tabel III.2
Logical Framework Analysis (LFA)
Penyusunan Tema RKPD Tuban tahun 2026

NO	DOKUMEN	ARAH KEBIJAKAN 2025-2029	KEY POINT 2025-2029
1.	RPJPN 2025-2045	Penataan pondasi transformasi Indonesia (transformasi sosial, ekonomi dan tatakelola)	• Transformasi Sosial: Fokus Penurunan PPKS dan IPM; • Transformasi Ekonomi: Fokus LPE, Gini, PDRB Perkapita; • Transformasi Tatakelola: Fokus IGG, SAKIP, SKM, Transformasi Digital
2.	RPJPD JATIM 2025-2045	Fokus pada penguatan transformasi sosial, ekonomi, dan tatakelola	
3.	RPJPD TUBAN 2025-2045	Tuban Tumbuh” bermakna bahwa pertumbuhan daerah memiliki peran yang penting dalam menciptakan fondasi transformasi (ekonomi, sosial dan tata kelola) yang berkelanjutan. Tuban melakukan “penguatan pondasi” yang mendukung “pertumbuhan (<i>Growth</i>)” IPM, Penurunan TPT-kemiskinan kesenjangan pendapatan, dan pemenuhan daya dukung infrastruktur.	Penguatan Pondasi untuk percepatan pencapaian : • Peningkatan IPM; • Pemenuhan daya dukung infrastruktur ekonomi dan sosial; • Mempertahankan LPE, sejalan dengan penurunan TPT sambil menekan kesenjangan (Inklusif); • Penurunan PPKS (Kemiskinan); • Aparatur Gesit, Birokrasi Kuat, Layanan Publik berkualitas merata; • Potensi lokal tumbuh optimal.

NO	DOKUMEN	ARAH KEBIJAKAN 2025-2029	KEY POINT 2025-2029
4.	RPJMD TUBAN 2025-2029	Arah Kebijakan tahun 2026 RPJMD : “Perwujudan Tuban Sejahtera Berbasis Pemenuhan Rasa Keadilan yang Berkekuatan Budaya, Berdaya Saing untuk Kehidupan yang Berkelanjutan”.	• Pencapaian target IKU dan IKD RPJMD tahun 2026; • Hasil Evaluasi RPJMD 2021-2026; • Hasil Evaluasi RKPD sebelumnya.
5.	TEMA RKP 2026	Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif	• Kedaulatan Pangan dan Energi; • Ekonomi Inklusif
6.	TEMA RKPD JATIM 2026	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi	• Ekonomi Inklusif; • Peningkatan Produktifitas, Kemandirian Pangan dan Energi
7.	TEMA RKPD TUBAN 2026	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Kemandirian Pangan melalui Konsolidasi dan Penguatan Infrastruktur Dasar	TEMA RKPD TUBAN 2026 ADALAH ELABORASI BERBAGAI <i>KEY POINT</i> DI ATAS

Sumber : RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026

Setelah dilakukan penyesuaian antara Arah Kebijakan RPJMD dengan Tema RKP Tahun 2026 dan Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 berdasarkan *keypoint*, maka ditetapkan Tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Gambar III.3
Keselarasan Tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026



Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa Tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026 telah diselaraskan dengan Tema RKP Tahun 2026 dan Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, Keselarasan ini penting untuk memastikan bahwa Prioritas Pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2026 menjadi bagian dari perwujudan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Sebagai upaya menjaga pencapaian tema dan sasaran pembangunan tahun 2026, maka ditetapkan prioritas pembangunan nasional tahun 2026 sebagaimana berikut:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan HAM;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, pendidikan, teknologi, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk menjaga pencapaian Tema dan Sasaran Pembangunan Jawa Timur Tahun 2025 maka ditetapkan prioritas pembangunan provinsi Jawa Timur tahun 2026 sebagaimana berikut:

1. Jatim Sejahtera, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan;
2. Jatim Kerja, memperluas lapangan kerja yang berkualitas;

3. Jatim Akses, memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan
4. Jatim Agro, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan;
5. Jatim Cerdas, memperkuat akses dan mutu pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan;
6. Jatim Sehat, Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan;
7. Jatim Berkah Amanah, memperkuat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, berdaya guna dan partisipatif;
8. Jatim Harmoni, menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif; dan
9. Jatim Lestari, menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Tuban periode 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian atas 12 Program Prioritas Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. Program penguatan konektivitas antarwilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pemerataan penerangan jalan, dan perluasan jangkauan transportasi publik;
2. Program Penataan kawasan perkotaan dan pedesaan yang partisipatif dengan menguatkan sarana prasarana permukiman, sanitasi (air bersih, pengelolaan sampah dan limbah), drainase, dan ruang publik;
3. Program pemantapan kualitas lingkungan hidup yang partisipatif melalui konservasi lahan kritis dan sumber air, ruang terbuka hijau, serta mitigasi dan penanggulangan bencana;
4. Program pengembangan wisata, ekonomi kreatif, UMKM, koperasi, BUMDes, dan kemitraan dengan dunia usaha untuk menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha;
5. Program peningkatan investasi dan pengembangan industri berbasis lingkungan yang bertumpu pada sektor primer dan sektor strategis daerah;
6. Program peningkatan produktivitas dan hilirisasi pertanian, peternakan serta perikanan yang mendukung ketahanan pangan;

7. Program peningkatan kualitas pendidikan, literasi masyarakat, serta prestasi pemuda dan olahraga melalui standarisasi sarana prasarana, tenaga pendidik, pendidikan karakter, dan muatan lokal yang menjangkau seluruh masyarakat;
8. Program penguatan kesehatan masyarakat melalui standarisasi pelayanan, sarana prasarana dan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pemantapan gerakan masyarakat hidup sehat;
9. Program peningkatan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan, anak, disabilitas dan lansia;
10. Program pemantapan nilai-nilai agama, budaya, dan toleransi serta peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
11. Program peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dengan menguatkan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan berbasis data serta peningkatan kualitas ASN melalui pemantapan budaya birokrasi yang melayani berbasis inovasi dan digital; dan
12. Program peningkatan kapasitas fiskal Daerah melalui peningkatan PAD dan optimalisasi sumber pendanaan lain untuk percepatan pembangunan.

Sebagai upaya mendukung pencapaian 12 prioritas strategis Kepala Daerah, tema pembangunan daerah Kabupaten Tuban pada tahun 2026, dan menguatkan pondasi “Tuban Tumbuh”, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tuban tahun 2026 diarahkan pada:

1. Percepatan peningkatan kualitas dan produktivitas SDM pendukung transformasi sosial sebagai pondasi “tuban tumbuh”;
2. Perluasan jangkauan layanan sosial inklusif yang difokuskan pada pengentasan kemiskinan berkesinambungan;
3. Optimalisasi pengelolaan potensi lokal (sektor primer pertanian) melalui hilirisasi komoditas unggul;
4. Pemenuhan layanan infrastruktur pendukung pemerataan pembangunan wilayah dan sektor strategis daerah; dan
5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan aparatur yang gesit (*agile*) sebagai pondasi mewujudkan layanan publik inovatif.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Tuban tahun 2025 - 2029, yaitu : “Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan”, yang ingin diwujudkan melalui misi keduanya yakni : “Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif”, dengan tujuan pada misi kedua tersebut yakni : “Meningkatnya nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah serta percepatan pengentasan kemiskinan”, yang akan diwujudkan melalui 2 (dua) sasaran yakni:

- 1) Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha, yang keberhasilannya diukur melalui indikator kinerja rasio kewirausahaan; dan
- 2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil dan berkelanjutan, yang keberhasilannya diukur melalui indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan rasio gini.

Hal tersebut merupakan tugas dan peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban untuk dapat mewujudkannya sehingga untuk dapat mendukung hal tersebut telah ditetapkan tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang ingin dicapai untuk masa lima tahun kedepan yang tertuang didalam dokumen perencanaan jangka menengah yakni : “Meningkatnya Kontribusi Perdagangan, Koperasi, dan UMKM terhadap Perekonomian Daerah”, dengan 2 (dua) indikator kinerja yakni : 1) Rasio Kewirausahaan, dan 2) Persentase Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sebagai implementasinya selanjutnya dijabarkan menjadi tiga sasaran yang ingin dicapai yakni:

1. Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro mapan, yang diukur keberhasilannya melalui dua indikator, meliputi : (a) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB; (b) Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha mapan;
2. Terkendalinya stabilitas harga, yang diukur keberhasilannya melalui indikator tingkat fluktuasi harga komoditas bapokting; dan
3. Meningkatnya nilai produk ekspor yang diukur keberhasilannya melalui indikator nilai ekspor barang.

Untuk lebih memperjelas penggambaran keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran beserta target kinerja yang harus dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan pada tahun 2026 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.3

Linieritas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran berdasarkan
Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029

Tujuan / Sasaran PD	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi	Target Renja 2026
Visi : Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan.				
Misi (2) : Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan SeluasLuasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.				
Tujuan Kabupaten : Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah serta percepatan pengentasan kemiskinan.	PDRB Per Kapita	(Rp Juta)	Nilai PDRB Per Kapita	75-78
	Tingkat Kemiskinan	%	Nilai Persentase Penduduk Miskin	13,66-13,06
Sasaran Kabupaten (1) : Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	Rasio Kewirausahaan	%	(Jumlah Wirausaha Pemula + Jumlah Wirausaha Mapan) / Jumlah Angkatan Kerja X 100%	8,29

Tujuan / Sasaran PD	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi	Target Renja 2026
Tujuan PD (1) : Meningkatnya Kontribusi Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Terhadap Perekonomian Daerah	Rasio Kewirausahaan	%	(Jumlah Wirausaha Pemula + Jumlah Wirausaha Mapan) / Jumlah Angkatan Kerja X 100%	8,29
Sasaran PD (1) : Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Mapan	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	Volume Usaha Koperasi / Nilai PDRB ADHB X 100%	0,56
	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha Mapan	%	Jumlah Usaha Mikro Mapan / Jumlah Seluruh Usaha Mikro X 100%	19,79
Sasaran Kabupaten (2) : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Stabil dan Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	(PDRB Tahun N – PDRB Tahun N-1) / PDRB Tahun N-1 X 100 %	3,40-4,23
	Rasio Gini	Angka	Nilai Rasio Gini	0,346-0,330
Tujuan PD (2) : Meningkatkan Kontribusi Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Terhadap Perekonomian Daerah	Persentase Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	Nilai Persentase Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,47

Tujuan / Sasaran PD	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi	Target Renja 2026
Sasaran PD (2) : Terkendalnya Stabilitas Harga	Tingkat Fluktuasi Harga Komoditas Bapokting	%	(Jumlah Rata-Rata Harga Bapokting pada Tahun N - Jumlah Rata-Rata Harga Bapokting pada Tahun N -1) dibagi Jumlah Rata-Rata Harga Bapokting pada Tahun N -1 X 100%	0,9
Sasaran PD (3) : Meningkatnya Nilai Produk Ekspor	Nilai Ekspor Barang	USD (Billion)	Nilai Ekspor Barang Luar Negeri	6,42
Sasaran PD (4) : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Angka	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,99

Sumber : RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029

3.3 Program dan Kegiatan

Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban pada lima tahun kedepan yang termuat didalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 guna mendukung percepatan pencapaian Visi dan Misi kedua Kepala Daerah Kabupaten Tuban maka didalam rencana kerjanya Tahun 2026 akan ditempuh melalui 10 (sepuluh) program yang meliputi 18 (delapan belas) kegiatan, serta 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.4 (TC.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
2.17. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		84,90 Poin	16.914.005.227			85,40 Poin	16.317.356.986

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2.17. 01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun		9 Dokumen	61.593.800			9 Dokumen	96.500.000
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tuban Kel. Latsari	2 Dokumen	19.265.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		2 Dokumen	23.000.000
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tuban Kel. Latsari	7 Laporan	42.328.800	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		7 Laporan	73.500.000
2.17. 1.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang Tersusun		9 Jenis	13.980.746.542			9 Jenis	15.004.856.986

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tuban Kel. Latsari	134 Orang/ bln	13.843.788.986	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		129 Orang/ bln	14.864.796.986
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tuban Kel. Latsari	12 Dokumen	103.660.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		12 Dokumen	103.660.000
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Kec. Tuban Kel. Latsari	23 Laporan	33.297.556	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		23 Laporan	37.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2.17. 1.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian	Kec. Tuban Kel. Latsari	1 Jenis	3.500.000			1 Jenis	4.000.000
0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Tuban Kel. Latsari	140 Dokumen	3.500.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		140 Dokumen	4.000.000
2.17. 1.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum		5 Jenis	293.917.930			5 Jenis	300.500.000
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tuban Kel. Latsari	2 Paket	70.000.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		2 Paket	70.000.000
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tuban Kel. Latsari	1 Paket	95.893.250	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1 Paket	97.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tuban Kel. Latsari	2 Paket	44.996.280	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		2 Paket	46.000.000
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tuban Kel. Latsari	52 Laporan	70.000.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		70 Laporan	75.000.000
0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Tuban Kel. Latsari	1 Dokumen	13.028.400	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1 Dokumen	12.000.000
2.17. 1.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah		2 Jenis	326.882.400			2 Jenis	140.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Tuban Kel. Latsari	2 Unit	156.787.500	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1 Unit	30.000.000
0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Tuban Kel. Latsari	12 Unit	170.094.900	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		12 Unit	110.000.000
2.17. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang		2 Jenis	1.945.290.685			2 Jenis	464.500.000
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tuban Kel. Latsari	12 Laporan	566.941.100	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		12 Laporan	407.000.000
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tuban Kel. Latsari	12 Laporan	1.378.349.585	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		12 Laporan	57.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2.17. 1.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah		3 Jenis	302.073.870			3 Jenis	307.000.000
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Tuban Kel. Latsari	30 Unit	152.000.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		30 Unit	154.000.000
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Tuban Kel. Latsari	69 Unit	60.072.300	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		69 Unit	62.000.000
0009	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kec. Tuban Kel. Latsari	1 Unit	90.001.570	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1 Unit	91.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2.17. 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase Koperasi Sehat		16,79%	55.862.500			20,44%	117.000.000
2.17. 03.2. 01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Berkategori Sehat		230 Unit Usaha	55.862.500			280 Unit Usaha	117.000.000
0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kab. Tuban, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	557 Unit Usaha	55.862.500	PENDAPATAN BAGI HASIL		557 Unit Usaha	117.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2.17. 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitasnya		10,81 %	859.719.000			5,35%	750.000.000
2.17. 5.2.0 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola Koperasi yang Dibina		27,64%	859.719.000			200 Orang	750.000.000
0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	200 Orang	859.719.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DAK NON FISIK-PK2UKM		240 Orang	750.000.000
2.17. 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Berkualitas		36,65 %	484.212.100			54,60%	645.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2.17. 06.2. 01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Aktif		52,04 %	484.212.100			275 Unit Usaha	645.000.000
0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Tuban, Latsari	290 Unit Usaha	484.212.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL		305 Unit Usaha	645.000.000
2.17. 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	Persentase Usaha Mikro yang Terstandarisasi		23,35%	1.865.812.600			24,71%	532.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2.17. 07.2. 01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi standarisasi usaha		25,04%	1.865.812.600			2,19%	532.000.000
0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	300 Unit Usaha	65.220.000	PENDAPATAN BAGI HASIL		350 Unit Usaha	75.000.000
0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	300 Unit Usaha	128.025.000	PENDAPATAN BAGI HASIL		400 Unit Usaha	175.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	580 Orang	764.269.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL		150 Orang	95.000.000
0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Grabagan	800 orang	908.297.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DAK NON FISIK-PK2UKM		260 Orang	187.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3.30. 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Prasarana Distribusi Perdagangan yang Difungsikan		75 %	16.797.308.948			88,50%	1.350.000.000
3.30. 03.2. 01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Terpelihara		3 Unit	15.993.510.435			1 Unit	250.000.000
0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	15.993.510.435	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH)		10 Unit	250.000.000
3.30. 03.2. 02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Retribusi Pasar Daerah		5.201.28 1.951	803.798.513			96%	1.100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	803.798.513	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL		12 Dokumen	1.100.000.000
3.30. 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata-rata Harga Bahan Pokok dan Penting		30.400 Rupiah	561.505.550			30.500 Rupiah	542.000.000
3.30. 04.2. 02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan berdasarkan Hasil Catatan Pemantauan Harga Bahan Pokok		15 Rekomen dasi	503.520.300			22 Jenis	500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	503.520.300	PENDAPATAN BAGI HASIL		12 Laporan	500.000.000
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan berdasarkan Hasil Catatan Pemantauan Distribusi Pupuk		2 Rekomendasi	57.985.250			94%	42.000.000
0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi min90%	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	57.985.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL		4 Laporan	42.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3.30. 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaku Usaha Ekspor		35,14%	214.928.820			12 Miliar	215.000.000
3.30. 05.2. 01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pengembangan Ekspor		153 Pelaku Usaha	214.928.820			0,16%	215.000.000
0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Pelaku Usaha	195.855.220	PENDAPATAN BAGI HASIL		4 Pelaku Usaha	200.000.000
0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Produk	19.073.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL		40 Produk	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3.30. 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		92%	167.572.800			93%	175.000.000
3.30. 06.2. 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase Alat- alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (%)		91,05%	167.572.800			92,05%	175.000.000
0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12567 Unit	167.572.800	PENDAPATAN BAGI HASIL		12705 Unit	175.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3.30.07	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Lokal yang Dipromosikan		31,33%	293.676.300			36,43%	325.000.000
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang Bermitra		146 Pelaku Usaha	293.676.300			13,10 Milyar	325.000.000
0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Memperoleh Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kec. Tuban Kel. Latsari	40 UMKM	293.676.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL		74 UMKM	325.000.000
		JUMLAH			38.214.603.845				20.968.356.986

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil telaahan terhadap tujuan dan sasaran serta mempertimbangkan berbagai usulan dari masyarakat, masukan dari lembaga legislatif serta berbagai rencana program dan kegiatan prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tuban, maka untuk Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan Rencana Kerja dan Pendanaan yang menjadi prioritas yang layak dan prioritas untuk dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan pada dua urusan yang ditangani meliputi melalui 10 (sepuluh) program yang meliputi 18 (delapan belas) kegiatan, serta 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp38.214.603.845,00 (tiga puluh delapan milyar dua ratus empat belas juta enam ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

Dari total anggaran tersebut terbagi kedalam 2 (dua) urusan yang ditangani, beserta urusan penunjang pemerintahan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp3.265.606.200,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus enam ribu dua ratus rupiah), meliputi : 4 (empat) Program, 4 (empat) kegiatan, dengan 7 (tujuh) Sub Kegiatan;
2. Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp18.034.992.418,00 (delapan belas milyar tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah), meliputi : 5 (lima) Program, 7 (tujuh) Kegiatan, dengan 8 (delapan) Sub Kegiatan;
3. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp16.914.005.227,00 (enam belas milyar sembilan ratus empat belas juta lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), meliputi : 1 (satu) Program, 7 (tujuh) Kegiatan, dengan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan.

Secara rinci alokasi anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat sebagaimana tabel IV.1 berikut:

Tabel IV.1

Rumusan Rencana Kerja serta Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				
				Formulasi	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2.17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
2.17.0 1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat Daerah pada tahun n		84,90 Poin	16.914.005.227	
2.17.0 1.2.01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun pada Tahun n		9 Dokumen	61.593.800	
0001	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun pada Tahun n	Kec. Tuban Kel. Latsari	2 Dokumen	19.265.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				
				Formulasi	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
0007	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja yang tersusun pada Tahun n	Kec. Tuban Kel. Latsari	7 Laporan	42.328.800	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
2.17.1 .2.02	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang Tersusun	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang Tersusun pada Tahun n		9 Jenis	13.980.746.542	
0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun n	Kec. Tuban Kel. Latsari	134 Orang/bln	13.843.788.986	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
0002	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Tahun n	Kec. Tuban Kel. Latsari	12 Dokumen	103.660.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
0007	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tahun n	Kec. Tuban Kel. Latsari	23 Laporan	33.297.556	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				
				Formulasi	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
2.17.1 .2.05	Terlaksananya Fasilitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian	Jumlah Jenis Layanan untuk Pegawai (sesuai jumlah sub kegiatan) pada Tahun n	Kec. Tuban Kel. Latsari	1 Jenis	3.500.000	
0003	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Arsip Pegawai (ASN dan Non ASN) pada Tahun n	Kec. Tuban Kel. Latsari	140 Dokumen	3.500.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
2.17.1 .2.06	Terlaksananya Fasilitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum yang diberikan pada tahun berjalan		5 Jenis	293.917.930	
0002	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada Tahun n	Kec. Tuban Kel. Latsari	2 Paket	70.000.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada Tahun n	Kec. Tuban Kel. Latsari	1 Paket	95.893.250	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
0005	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada Tahun n	Kec. Tuban Kel. Latsari	2 Paket	44.996.280	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				
				Formulasi	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
0009	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas yang Disusun pada Tahun n	Kec. Tuban Kel. Latsari	52 Laporan	70.000.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
0011	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Tahun n	Kec. Tuban Kel. Latsari	1 Dokumen	13.028.400	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
2.17.1 .2.07	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah pada Tahun n		2 Jenis	326.882.400	
0005	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada Tahun n	Kec. Tuban Kel. Latsari	2 Unit	156.787.500	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
0006	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada Tahun n	Kec. Tuban Kel. Latsari	12 Unit	170.094.900	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				
				Formulasi	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
2.17.0 1.2.08	Terlaksananya Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang yang Disediakan pada Tahun n		2 Jenis	1.945.290.685	
0002	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada Tahun n	Kec. Tuban Kel. Latsari	12 Laporan	566.941.100	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
0004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada Tahun n	Kec. Tuban Kel. Latsari	12 Laporan	1.378.349.585	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
2.17.1 .2.09	Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Difasilitasi pada Tahun n		3 Jenis	302.073.870	
0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada Tahun n	Kec. Tuban Kel. Latsari	30 Unit	152.000.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				
				Formulasi	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
0006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada Tahun n	Kec. Tuban Kel. Latsari	69 Unit	60.072.300	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
0009	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada Tahun n	Kec. Tuban Kel. Latsari	1 Unit	90.001.570	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
2.17.03	Meningkatnya Koperasi Sehat	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	Jumlah Koperasi Sehat Tahun N / Jumlah Seluruh Koperasi X 100%		16,79%	55.862.500	
2.17.03.2.01	Meningkatnya Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perkoperasian	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Berkategori Sehat	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Standarisasi Koperasi Sehat Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi pada Tahun n		230 Unit Usaha	55.862.500	
0004	Melakukan Penilaian Kesehatan dan Akuntabilitas Koperasi	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan pada tahun n	Kab. Tuban, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	557 Unit Usaha	55.862.500	PENDAPATAN BAGI HASIL
2.17.05	Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitasnya (Bersertifikasi) / Jumlah Total SDM Koperasi X 100%		10,81 %	859.719.000	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				
				Formulasi	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
2.17.5 .2.01	Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Koperasi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola Koperasi yang Dibina	Jumlah Pengelola Koperasi yang Dibina pada Tahun n (kumulatif) / Jumlah Total SDM Koperasi X 100%		27,64%	859.719.000	
0001	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah Pengelola Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan pada Tahun n	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	200 Orang	859.719.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DAK NON FISIK-PK2UKM
2.17.0 6	Meningkatnya Kualitas Koperasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT dan Meningkatkan Volume Usaha Atau Asset / Jumlah Total Koperasi Aktif X 100%		36,65 %	484.212.100	
2.17.0 6.2.01	Meningkatnya Produktifitas Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi yang Aktif pada Tahun n / Jumlah Total Koperasi X 100%		52,04 %	484.212.100	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				
				Formulasi	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
0005	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Difasilitasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi pada tahun n	Kab. Tuban, Latsari	290 Unit Usaha	484.212.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
2.17.07	Meningkatnya Usaha Mikro yang Terstandarisasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Terstandarisasi	Jumlah Usaha Mikro yang Sesuai Standar / Jumlah Total Usaha Mikro X 100% Keterangan: NIB, Sertifikasi (Halal, PIRT, Merk, SLHS)		23,35%	1.865.812.600	
2.17.07.2.01	Meningkatnya Fasilitas Standarisasi Usaha Mikro (Akses Perizinan, Sertifikasi dan Pemasaran serta Permodalan bagi Usaha Mikro)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitas standarisasi usaha	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Standarisasi / Jumlah Total Usaha Mikro X 100%		25,04%	1.865.812.600	
0002	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Kemitraan Usaha Mikro pada Tahun n	Kab. Tuban, Semanding, Semua Kel/Desa	300 Unit Usaha	65.220.000	PENDAPATAN BAGI HASIL

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				
				Formulasi	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
0003	Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan pada Tahun n	Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	300 Unit Usaha	128.025.000	PENDAPATAN BAGI HASIL
0005	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM Usaha Mikro yang Difasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan pada tahun n	Kab. Tuban, Bancar, Semua Kel/Desa	580 Orang	764.269.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
0015	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM Usaha Mikro yang Difasilitasi Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan pada Tahun n	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Senori, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Montong, Semua Kel/Desa Kab. Tuban, Grabagan, Semua Kel/Desa	800 orang	908.297.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DAK NON FISIK-PK2UKM

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				
				Formulasi	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
3.30.03	Meningkatnya Kualitas Prasarana Distribusi Perdagangan yang Difungsikan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Prasarana Distribusi Perdagangan yang Difungsikan	Jumlah Prasarana Distribusi Perdagangan yang Difungsikan / Jumlah Seluruh Prasarana Distribusi Perdagangan X 100% Keterangan: (Pasar Daerah, SRG dan Abirama)		75 %	16.797.308.948	
3.30.03.2.01	Terpenuhinya Pemeliharaan dan Revitalisasi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Terpelihara	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Terpelihara pada Tahun n		3 Unit	15.993.510.435	
0001	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan pada Tahun n	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	15.993.510.435	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH)

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				
				Formulasi	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
3.30.0 3.2.02	Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan yang Baik dan Tertib	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Retribusi Pasar Daerah	Jumlah Retribusi Pasar Daerah (Los, Kios, Pelataran/Dasaran, MCK, Kebersihan, dan Parkir Pasar Daerah) pada tahun n		5.201.281.951	803.798.513	
0001	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan pada tahun n	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	803.798.513	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
3.30.0 4	Tersedianya Informasi Perkembangan Harga Komoditas Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata-rata Harga Bahan Pokok dan Penting	Jumlah Total Rata-Rata Harga Komoditas Bapokting sampai dengan Bulan Berjalan / Jumlah Bulan yang Telah Berjalan		30.400 Rupiah	561.505.550	
3.30.0 4.2.02	Terpantaunya Harga Bahan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan berdasarkan Hasil Catatan Pemantauan Harga Bahan Pokok	Jumlah Rekomendasi berdasarkan Hasil Temuan Pemantauan pada tahun n		15 Rekomendasi	503.520.300	
0001	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Daerah pada tahun n	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	503.520.300	PENDAPATAN BAGI HASIL

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				
				Formulasi	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
	Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					
3.30.0 4.2.03	Terpantaunya Distribusi Pupuk Bersubsidi sesuai Ketentuan	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan berdasarkan Hasil Catatan Pemantauan Distribusi Pupuk	Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan berdasarkan Hasil Catatan Pemantauan Distribusi Pupuk pada tahun n		2 Rekomendasi	57.985.250	
0003	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi per tribulanan pada tahun n	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	57.985.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
3.30.0 5	Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor Luar Negeri / Wirausaha Mapan X 100 %		35,14%	214.928.820	
3.30.0 5.2.01	Meningkatnya Fasilitas Perluasan Jaringan Pemasaran	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pengembangan Ekspor	Kumulatif Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pengembangan Ekspor sampai dengan Tahun n		153 Pelaku Usaha	214.928.820	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				
				Formulasi	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
0002	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang pada Tahun n	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Pelaku Usaha	195.855.220	PENDAPATAN BAGI HASIL
0005	Meningkatkan Citra Produk Ekspor	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi pada tahun n	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Produk	19.073.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
3.30.06	Meningkatnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku pada Tahun N / Jumlah UTTP yang Ada X 100%		92%	167.572.800	
3.30.06.2.01	Meningkatnya Fasilitasi Layanan Metrologi Legal	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (%)	Jumlah UTTP yang Ditera, Tera Ulang Pada Tahun N / Jumlah UTTP yang Ada X 100%		91,05%	167.572.800	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				
				Formulasi	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
0001	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan terhadap Ketentuan yang Berlaku	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera, Tera Ulang pada tahun n	Kab. Tuban, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12567 Unit	167.572.800	PENDAPATAN BAGI HASIL
3.30.07	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Lokal	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Lokal yang Dipromosikan	Jumlah Produk Lokal yang Dipromosikan / Jumlah Seluruh Produk Lokal		31,33%	293.676.300	
3.30.07.2.01	Meningkatnya Fasilitas Promosi dan Pemasaran Produk UMKM	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang Bermitra	Jumlah Pelaku Usaha yang Bermitra (Kumulatif) pada tahun n		146 Pelaku Usaha	293.676.300	
0005	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Memperoleh Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Memperoleh Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota pada tahun n	Kec. Tuban Kel. Latsari	40 UMKM	293.676.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL
			JUMLAH				38.214.603.845	

Sumber : RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026 ini disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, yang berpedoman dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 sebagai penjabaran tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2026 ini merupakan uraian yang berisikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta rencana program dan kegiatan dengan kebutuhan dan sumber pendanaannya, yang akan dilaksanakan selama tahun 2026, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya menangani dua urusan yang menjadi tanggungjawabnya, yakni urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan, yang mana didalam pelaksanaannya juga sebagai upaya mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan untuk dapat dicapai pada tahun yang bersangkutan, sebagai dukungan atas tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Tuban.

Didalam penyusunannya, rencana kerja ini sudah melalui berbagai mekanisme tahapan, diantaranya dengan memperhatikan masukan dan usulan dari bawah yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan yang kemudian disinkronisasikan dengan prioritas perangkat daerah melalui forum perangkat daerah serta kemudian disinkronisasikan kembali dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat Kabupaten Tuban dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan sejalan dengan tugas fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, guna melihat keterkaitan serta tingkat urgensi dari setiap program dan kegiatan yang diusulkan untuk nantinya dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026.

Kami menyadari bahwa didalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 ini, walaupun telah disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan serta mengacu dan berpedoman pada rencana strategis serta mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah, dengan mekanisme melalui berbagai tahapan pada kenyataannya didalam pelaksanaan kedepan,

sejalan dengan perubahan kondisi dan perubahan keadaan yang senantiasa berkembang di masyarakat tentulah akan terjadi perubahan kebutuhan yang menuntut dilakukan penyesuaian-penyesuaian target-target kinerja keluaran, yang mana akan berimbas pada besaran anggaran yang dibutuhkan dan perlu disesuaikan sehingga berkenaan dengan kondisi tersebut maka segala materi didalam rencana kerja ini tentunya juga dimungkinkan akan mengalami penyesuaian-penyesuaian, yang akan dilakukan pada saat perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada pertengahan Tahun Anggaran 2026 mendatang.

Akhirnya, semoga dengan tersusunnya rencana kerja ini dapat memberi manfaat kepada pihak terkait maupun bagi para aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan menuangkan kedalam prioritas dan plafon anggaran sementara serta kedalam rencana kerja dan anggaran yang akan diimplementasikan pelaksanaannya melalui dokumen pelaksanaan anggaran yang didalamnya berisi rekening-rekening belanja sesuai dengan standar satuan harga yang dibutuhkan.

KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

Drs. GUNADI, M.M.



BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY